

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Amerika Serikat begitu menentang program pengembangan nuklir Iran karena Amerika Serikat menganggap Iran dapat menghalangi upaya Amerika Serikat dalam menguasai kawasan Timur Tengah. Dan yang menjadi alasan utama lainnya adalah ancaman Iran terhadap hegemoni Amerika Serikat di dunia internasional.

Dalih yang dilontarkan Amerika bahwa politik di negara Iran bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dijunjung Amerika Serikat, sebenarnya alasan yang dibuat-buat. Amerika Serikat menganggap Iran yang dikuasai oleh kaum Mullah bertentangan dengan prinsip demokrasi Amerika Serikat. Padahal pemilihan Presiden yang dijalankan Iran sesuai dengan aturan demokrasi yang berlaku. Bahkan para pengamat berpendapat bahwa hasil pemilu yang dijalankan Iran jujur dan bersih. Namun karena tokoh yang memenangkan hasil pemilu tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat (sebagai contoh ketika Ahmadinejad keluar sebagai pemenang, sebenarnya Amerika Serikat menginginkan Rafsanjani yang dianggap lebih pro kepada negara Barat untuk menjadi presiden Iran) maka kemudian Amerika Serikat melontarkan anggapan bahwa pemilu tersebut tidak sesuai dengan demokrasi yang dijunjung Amerika Serikat.

Pertentangan politik antara Amerika Serikat dan Iran baru muncul ketika Revolusi Islam pecah dan berhasil menggulingkan shah Pahlevi yang saat itu berkuasa. Sebelum Revolusi Islam Iran pecah, kebijakan-kebijakan luar negeri Iran banyak yang mendukung keinginan Barat, oleh sebab itu hubungan antara Iran dan Amerika Serikat terbilang cukup harmonis, bahkan Amerika Serikat lah yang pertama kali mendukung Iran dalam program nuklirnya. Namun setelah Revolusi Islam pecah dan pemerintahan Iran direformasi, Amerika Serikat berbalik bersikap memusuhi Iran. Konflik tersebut berlanjut hingga sekarang, selama Iran tidak bersikap tunduk pada keinginan Amerika Serikat maka konflik itu akan terus berlanjut.

Lalu adalagi dalih yang dilontarkan Amerika Serikat, yaitu Iran dianggap sebagai salah satu dari negara pembangkang (*Rogue State*) dimana merupakan negara

yang dapat mengancam keamanan internasional. Iran termasuk ke dalam kategori tersebut berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di dalam dokumen pertahanan dan keamanan Amerika Serikat pasca peristiwa 11 September 2001, sebagai berikut ; Negara yang pemerintahannya bertindak opresif, brutal terhadap rakyatnya, serta mengksplorasi sumber daya nasionalnya demi kepentingan penguasa, bersiap mengabaikan hukum internasional, mengancam negara-negara di sekitarnya, memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam, ofensif, atau mencapai tujuan agrefif rezim penguasa, menjadi sponsor terorisme yang bersifat global, dan menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat. Oleh sebab itu atas dasar ciri-ciri tersebut, Amerika Serikat begitu menentang segala kebijakan luar negeri Iran terutama yang berkaitan dengan program pengembangan nuklirnya.

Dan karenanya dengan program pengembangan nuklirnya, Iran dituding Amerika Serikat sebagai negara pendukung dan bahkan juga termasuk ke dalam negara teroris. Karena program nuklir Iran dituduh Amerika Serikat bukan untuk tujuan damai yaitu sebagai sumber energi, namun akan dikembangkan sebagai senjata pemusnah massal. Padahal sebenarnya karena Iran banyak menentang kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama yang berkaitan dengan masalah pertikaian antara Israel dan Palestina. Bahkan Iran dengan berani menyatakan tidak mau mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Oleh sebab itu Amerika banyak melontarkan tudingan-tudingan negatif berkenaan dengan program pengembangan nuklir Iran.

Segala kecurigaan yang ditudingkan negara Paman Sam tersebut terhadap Iran karena Amerika Serikat berpendapat bahwa Iran tidak bersikap transparan alias menyembunyikan sesuatu berkenaan dengan program nuklirnya. Segala upaya Iran dengan membiarkan fasilitas-fasilitas nuklirnya untuk diperiksa dan diawasi oleh IAEA sepertinya tidak dapat membendung kecurigaan Amerika Serikat, tetap saja Iran dituduh mengembangkan persenjataan nuklir. Selama ini Iran bersikap transparan dengan program nuklirnya, namun tuduhan Amerika Serikat menyatakan sebaliknya karena negara tersebut mencurigai Iran mengembangkan persenjataan nuklir. Akan berbeda apabila pemerintahan Iran bersikap mendukung

segala kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan tidak bersikap terang-terangan memusuhi Israel, maka pasti Iran akan mendapatkan segala dukungan berkenaan dengan program nuklirnya. Jadi sebenarnya bukanlah sekedar masalah nuklir yang menjadi inti dari segala permasalahan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, tapi lebih kepada sikap politik kedua negara yang bertentangan.

Sebagai salah satu bukti, negara Pakistan kini telah mendapat restu dari Amerika Serikat berkenaan dengan program nuklirnya. Padahal dulunya Amerika Serikat juga menentang program tersebut, namun setelah Pakistan menyatakan diri siap mendukung aksi dan upaya Amerika Serikat dalam memberantas terorisme, Amerika Serikat pun berbalik bersikap lunak terhadap negara tersebut.

Banyak faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat baik secara umum maupun yang berkaitan dengan program nuklir Iran, diantaranya kepentingan atau kebutuhan Amerika Serikat akan minyak. Sebagai negara industri besar tidaklah mengherankan apabila Amerika Serikat membutuhkan banyak sumber energi dan minyak menjadi salah satu sumber utama bagi roda perindustrian Amerika Serikat. Bukanlah suatu rahasia apabila Amerika Serikat begitu berambisi menguasai kawasan Timur Tengah yang notabene merupakan kawasan penghasil minyak di dunia. Salah satu bukti nyatanya adalah penyerangan Amerika Serikat ke Irak, yang dilakukan dengan dalih Irak menyimpan senjata pemusnah massal dan sebagai *Rogue State*, rezim Saddam Hussein menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya dan oleh sebab itu Amerika Serikat berkeinginan untuk mengambilalih pemerintahan tersebut dan merombaknya agar sesuai dengan prinsip demokrasi. Padahal alasan sesungguhnya adalah keinginan Amerika Serikat untuk menguasai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia itu. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga Bush yang pada saat itu menjabat menjadi presiden yang merupakan sebuah keluarga dengan latar belakang pengusaha di bidang perminyakan.

Selain faktor minyak tersebut, kebangkitan politik islam di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari situ kemudian muncul Islam Fundamentalis dan Islam Radikalis dimana keduanya dianggap sebagai bagian

dari terorisme. Selain itu kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintahan Islam banyak yang bertentangan dengan kemauan Amerika Serikat dan para sekutunya. Ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa 9/11 dimana Amerika Serikat semakin melancarkan kecurigaannya kepada negara-negara Islam, Bush dan para sekutunya menuding semua negara Islam sebagai sumber teroris. Oleh sebab itu kemudian Amerika Serikat mengeluarkan dokumen pertahanan keamanannya yang lebih dikenal dengan *US National Security Strategy*, dimana Amerika Serikat kemudian mengajak seluruh negara di dunia untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan teroris. Dan bagi negara yang tidak mau ikut serta dalam upaya tersebut, maka akan dicap sebagai lawan dari Amerika Serikat dan para sekutunya. Dengan sikapnya yang keras, Amerika Serikat tampaknya ingin melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antar negara. Pernyataan Presiden George W. Bush, "*either you are with us or you are with the terrorists*," secara hitam putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*). Pemilahan dunia demikian mempersulit posisi banyak negara, khususnya negara-negara pasca kolonial yang tidak ingin dipersepsikan oleh konstituennya berada dalam orbit Amerika Serikat. Lagipula, tampaknya sulit bagi Amerika Serikat untuk menerima pendapat negara-negara lain bahwa perang melawan terorisme tidak harus dilakukan dibawah pimpinan Amerika Serikat. Sementara itu bagi banyak negara berkembang, masalah kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan konflik antar-etnik dilihat lebih berbahaya ketimbang masalah terorisme sebagai ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah negara.

Tragedi 11 September juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan Amerika Serikat dalam menilai sebuah negara. Sekarang ini, Amerika Serikat cenderung lebih hirau kepada masalah terorisme ketimbang isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Kenyataan bahwa Presiden Pervez Musharraf di Pakistan naik ke panggung kekuasaan melalui kudeta militer, misalnya, tidak lagi menjadi penghalang bagi AS untuk menjalin aliansi anti-terorisme dengan negara itu. Dengan kata lain, AS tampaknya cenderung menjadikan "komitmen" melawan terorisme, ketimbang komitmen terhadap

demokrasi dan HAM, sebagai alat menilai siapa lawan dan kawan. Akibatnya, telah terjadi pergeseran agenda global dari demokrasi dan HAM menjadi perang khususnya terorisme yang dianggap mengancam kepentingan dan keamanan Amerika Serikat secara langsung.

Ditambah dengan adanya kecenderungan yang mengaitkan Islam dengan terorisme di kalangan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, tatanan politik global semakin diperumit oleh ketegangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Islam ataupun negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kehati-hatian dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam merespon persoalan terorisme ini kerap menimbulkan kecurigaan dari Amerika Serikat, dan bahkan tidak jarang melahirkan tekanan-tekanan politik yang tidak mudah untuk dihadapi. Akibatnya, pemerintah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim kerap dihadapkan kepada dilema antara "kewajiban" memberantas terorisme di satu pihak dan keharusan untuk menjaga hak-hak konstituen domestik di lain pihak. Dengan kata lain, kebijakan "perang terhadap terorisme" yang dijalankan Amerika Serikat telah menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok-kelompok Islam di banyak negara Muslim. Sampai sekarang, Amerika Serikat tampaknya masih mengalami kesulitan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan "perang melawan terorisme" yang tidak menimbulkan komplikasi dalam hubungannya dengan Dunia Islam.

Untuk mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan teroris di masa depan, Amerika Serikat juga telah mengadopsi sebuah doktrin baru, yakni doktrin *preemption*. Melalui doktrin ini, Amerika Serikat secara sepihak memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, khususnya melalui tindakan militer unilateral, untuk menghancurkan apa yang dipersepsikannya sebagai kemungkinan ancaman teror terhadap kepentingan Amerika Serikat di mana saja. Doktrin *preemption* tersebut jelas meresahkan banyak negara, dan dapat mengubah tatanan, nilai dan norma-norma hubungan antarnegara secara fundamental. Dalam konteks doktrin *preemption* dan kecenderungan unilateralis itu, prinsip kedaulatan negara, arti penting dan peran institusi-institusi multilateral seperti PBB dan organisasi regional, serta ketentuan-

ketentuan hukum internasional dapat saja diabaikan. Dengan kata lain, unilateralisme Amerika Serikat, yang didukung dengan kekuatan ekonomi dan militer yang tidak tertandingi, akan menjadi faktor penentu yang sangat dominan bagi tatanan politik global di waktu mendatang.

Amerika Serikat kini tampil sebagai negara adidaya tunggal yang sangat yakin bahwa pendekatan militer merupakan pendekatan terbaik dalam memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingan keamanannya. Aksi serangan militer ke Afghanistan, dan invasi ke Irak, merupakan contoh nyata dari keyakinan demikian. Penekanan kepada pendekatan militer itu terlihat juga melalui peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan sejak 11 September, peran Pentagon yang dominan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, dan peningkatan bantuan militer kepada pemerintah di negara-negara yang diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi mitra dalam perang melawan terorisme, seperti Pakistan, Filipina, dan negara lainnya di Timur Tengah. Kecenderungan demikian juga terlihat dalam upayanya membangun koalisi internasional melawan terorisme, dimana AS tidak segan-segan mengucurkan dana milyaran dolar untuk memperkuat hubungan militer dengan negara-negara yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam perang terhadap terorisme. Bagi AS, upaya untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang dituduh menjadi organisasi teroris tampaknya jauh lebih penting ketimbang mencari dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya terorisme itu sendiri.

Dan yang menjadi faktor paling penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah campur tangan kaum Zionis di dalam pemerintahan di Amerika Serikat. Kaum Yahudi memang banyak memegang kekuasaan di Gedung Putih, jadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu harus memberi keuntungan dan mendukung segala tindakan Israel. Di Amerika, Yahudi juga menanamkan hegemoninya begitu dalam. Seluruh kegiatan politik amerika baik di dalam maupun di luar akan dipantau secara langsung oleh lembaga lobi yahudi yaitu AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Lembaga resmi ini didirikan tahun 1950-an. Kelompok lobi ini, dibangun oleh komunitas Yahudi Amerika untuk menjaga kepentingan Israel. AIPAC memiliki lima atau enam pelobi resmi di Kongres dengan staf berjumlah 150 orang, dengan dukungan

budget tahunan sebesar 15 juta dollar. Dana yang antara lain mereka kumpulkan dengan cara “memeras” diaspora Yahudi yang tinggal di Amerika. Mengeksploitasi perasaan bersalah para diaspora yang dianggap hidup enak di negeri orang, sementara saudaranya yang tinggal di Israel setiap hari harus berhadapan dengan intifada atau bom bunuh diri dari kelompok pejuang Palestina. Selain AIPAC, masih ada Conference of Presidents of Major Jewish Organizations (CPMJO). Menurut riset National Journal pada Maret 2005 dan Forbes pada 1997, dalam hal melobi Washington, AIPAC hanya kalah oleh Asosiasi Pensiunan Amerika Serikat. Mereka didukung tokoh-tokoh terkemuka Kristen Evangelis seperti Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson yang bernaung di bawah bendera The American Alliance of Jews and Christians (AAJC). Kelompok ini muncul pada Juli 2002 dipimpin Bauer dan Rabi Daniel Lapin. Kuatnya lobi Israel di Amerika telah berhasil memaksa Amerika untuk memberikan bantuan sebesar 3 miliar dolar per tahun pada Israel. Bantuan ini merupakan seperlima bantuan luar negeri Amerika. Selain soal dana, dukungan Amerika juga diaplikasikan pada PBB. Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2006, sudah 66 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi Israel di Palestina di veto Amerika.

Media massa Amerika Serikat merupakan alat yang sangat berperan bagi kaum Yahudi dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Gedung Putih. Orang-orang Yahudi tidak hanya menguasai jaringan media massa di Amerika Serikat, melainkan juga jaringan media massa yang menguasai arus informasi di berbagai penjuru dunia. Dewasa ini, sekitar 80 persen jaringan media massa Amerika Serikat dikuasai oleh kaum Yahudi.

Media-media massa di bawah kontrol orang-orang Yahudi di Amerika Serikat melakukan rekayasa informasi dan opini demi menggiring para pengambil keputusan di Gedung Putih untuk memiliki opini sebagaimana yang dikehendaki oleh Yahudi. Opini itulah yang kemudian akan berperan dalam berbagai pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui media massa pula, Yahudi mengangkat pamor tokoh-tokoh politik Amerika Serikat agar mendapat banyak suara dalam pemilu, atau sebaliknya menjatuhkan tokoh-tokoh politik yang tidak disukainya agar gagal dalam pemilu.

Melalui cara itu, tak heran bila para politisi Amerika Serikat sangat bergantung kepada lobi-lobi Yahudi. Dalam pemilu Kongres misalnya, para senator yang ingin meraih kursi berlomba-lomba untuk mencari dukungan dari organisasi-organisasi Yahudi. Dukungan yang diberikan oleh kaum Yahudi dalam hal ini antara lain berupa dana untuk kampanye serta propaganda media massa. Sebagai imbalannya, ketika telah terpilih, para senator itu harus mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada Rezim Yahudi.

Sementara itu, usaha untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri AS secara langsung dilakukan orang-orang Yahudi dengan cara menginfiltrasi pemerintah, Kongres, dan Dewan Tinggi Amerika Serikat. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Amerika Serikat karena mereka menguasai sumber-sumber keuangan dan ekonomi negara itu. Berbagai bank besar dan perusahaan raksasa di Amerika Serikat dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Berdasarkan data, 20 persen dari milyader Amerika Serikat adalah orang-orang Yahudi, padahal populasi orang Yahudi di Amerika Serikat hanya 3 persen. Dengan kondisi ini, tak heran bila kaum Yahudi dengan sebuah program meluas yang terencana, mampu menggunakan segala cara untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar menetapkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan kaum Yahudi. Namun itu semua tidak menghentikan Iran untuk terus mengembangkan program nuklirnya, oleh sebab itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui diplomasi yang dijalankannya terutama melalui diplomasi koersif dengan dikeluarkannya berbagai sanksi terhadap Iran, dapat dikatakan gagal karena hingga saat ini Iran masih menjalankan program pengembangan nuklirnya.

Selain itu Iran juga dapat dikatakan berhasil dalam mengantisipasi tekanan dari Amerika Serikat. Salah satu caranya adalah dengan mendekati negara-negara Non Blok dan negara dunia ketiga sehingga berhasil mendapatkan dukungan dari mereka. Selain itu Iran juga berhasil menjalin kerjasama dengan Rusia dan Cina baik dalam bidang perdagangan maupun kerjasama yang berkaitan dengan program nuklirnya.

Sementara itu sikap negara-negara lain di kawasan Timur Tengah bersikap netral alias tidak mendukung maupun menentang program Iran tersebut. Di satu sisi mereka takut terhadap ancaman-ancaman yang diberikan AS namun di sisi lain

mereka juga saja dulu berkeinginan dan berusaha mengembangkan nuklir, namun proyek-proyek tersebut banyak yang terhenti.

Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa bukanlah masalah keamanan internasional ataupun suatu tindakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dunia, Amerika Serikat menentang habis-habisan program nuklir Iran. Tapi semua menyangkut kepentingan 'pribadi' Amerika Serikat dan sekutu setianya Israel semata. Karena terbukti, walaupun Iran sudah bersikap terbuka dengan membiarkan fasilitas-fasilitas nuklirnya diperiksa IAEA dan banyak menandatangani perjanjian-perjanjian, tetap saja Amerika Serikat menudingkan tuduhan pada Iran. Sementara Israel yang jelas-jelas mengembangkan persenjataan nuklir dibiarkan begitu saja. Semua itu menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat berstandar ganda dan tidak adil. Dan selama Amerika Serikat masih menerapkan standar ganda seperti itu dan berlaku tidak adil, maka tidak pantas kiranya ia bersikap layaknya polisi dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan kemanan internasional.